



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SIGIT HANI HADIYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 708068

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **10.155.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 49 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 49 m2/49 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 49 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/20 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000
6. Tanah Seluas 3360 m2 di KAB / KOTA MALANG, HADIAH Rp. 1.700.000.000
7. Tanah Seluas 6070 m2 di KAB / KOTA MALANG, HADIAH Rp. 3.050.000.000
8. Bangunan Seluas 35 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
10. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 101.000.000

1. MOTOR, PIAGGIO ZIP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

1.000.000

2. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 146.100.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 302.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.018.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. 4.700.000

Sub Total

Rp. 11.726.800.000

III. HUTANG

Rp. 2.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.724.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.